

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara

Era Mustika Ginting¹ Fikri Ardiansyah Pulungan² Fildzah Darayani Mujasmara³
Rebecka Tri Talita Panggabean⁴ Indra Maipita⁵ Muammar Rinaldi⁶

Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email: eragntg@gmail.com¹

Abstrak

Penelitian bertujuan menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja daerah terhadap indeks pembangunan manusia. Metode yang digunakan adalah analisis data panel. Jenis penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh DJPK dan data statistik dari www.bps.go.id. Kriteria sampel penelitian meliputi seluruh 33 Kabupaten/Kota Sumatera Utara tahun 2019-2023 dengan E-Views versi 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana perimbangan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Secara simultan pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja daerah berpengaruh secara bersama-sama terhadap indeks pembangunan manusia provinsi Sumatera Utara. Setiap pemerintah di provinsi Sumatera Utara diharapkan lebih meningkatkan investasi dalam bentuk fisik sehingga aset tetap tiap tahun meningkat, sehingga dengan adanya sarana yang meningkat maka dapat mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: Pendapatan Hasil Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah, Indeks Pembangunan Manusia



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disusun sebagai salah satu dari indikator alternatif, selain pendapatan nasional per kapita, untuk menilai keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara. Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia yang telah disusun, maka bisa ditetapkan tiga kelompok negara. Pertama, negara dengan tingkat pembangunan manusia yang rendah bila IPM-nya berkisar antara 0 sampai 0,5. Kedua, negara dengan tingkat pembangunan manusia sedang jika IPM-nya berkisar antara 0,51 sampai 0,79. Ketiga, negara dengan tingkat pembangunan manusia tinggi jika IPM-nya berkisar antara 0,80 sampai 1. Jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran di Sumatera Utara yang masih tinggi, dinilai perlu untuk terus ditekan persentasenya pada 2011. Sebab, bila dua hal ini tidak segera ditangani, dampaknya bisa menyebabkan kerawanan sosial dan terjadinya instabilitas di tingkat lokal. Dari akhir Desember 2009 hingga April 2010, sebaran penduduk yang menganggur masih menumpuk di perkotaan, dan sebaran penduduk miskin masih tetap dominan di pedesaan. Dengan kondisi seperti ini, Sumut perlu melakukan tekanan terhadap kinerja untuk mengentaskan dua hal tersebut. Pembangunan di Indonesia pada daerah kabupaten dan kota sampai saat ini masih bergantung pada dana transfer dan pemerintah pusat. Kabupaten/kota baru berdiri yang berasal dari pemekaran pada awal pemerintahan bergantung kepada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Menurut Simanjuntak (2001) dalam Ndadari dan Adi (2008) walaupun otonomi sudah berjalan di tiap kabupaten dan kota namun pemerintah daerah belum sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat salah satunya

dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Menurut Adi dan Ndadari (2008) permasalahan yang terjadi saat ini adalah pemerintah daerah terlalu menggantungkan alokasi DAU untuk membiayai belanja modal dan pembangunan tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah.

Kemiskinan terus menjadi masalah utama dunia, khususnya Indonesia yang menjadi negara berkembang. Kemiskinan yang terjadi pada suatu negara dilihat menjadi permasalahan yang serius, karena pada masa sekarang kemiskinan membuat masyarakat Indonesia tidak bisa berkembang. Menurut M.Nasir (2008) permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan multidimensi. Kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu tingkat upah kurang, tingkat pengangguran yang tinggi dan IPM yang masih kurang. Dapat dikatakan miskin apabila belum bisa mencukupi kebutuhannya atau belum berpenghasilan. Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli). Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas manusia. Keberhasilan pembangunan manusia tidak dapat dilepaskan dari kinerja pemerintah yang berperan dalam menciptakan regulasi bagi tercapainya tertib sosial. Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan tentunya membutuhkan modal manusia yang berkualitas sebagai modal dasar pembangunan. Untuk menghasilkan manusia yang berkualitas diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas SDMnya. Menurut (Ginting, 2008) menyatakan pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi dibidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena asset utama penduduk miskin adalah tenaga kasar mereka.

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (BPPRD, 2022) yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain. Agar hal ini dapat dicapai tentunya harus dilakukan langkahlangkah yang ditindak lanjuti. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang cukup penting (Kemenkeu DJPK, 2014) dalam untuk melakukan aktivitas pemerintahan, menentukan kemampuan daerah dan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan. Tetapi, dalam kenyataannya masih banyak daerah yang memiliki struktur kontribusi PAD relatif lebih rendah (Nasir, 2019) terhadap total penerimaan daerah. Namun, sebaliknya sebagian penerimaan pendapatan terbesar justru berasal dari instansi lebih tinggi atau pemerintah pusat, hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan yang masih sangat besar dari pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Kegiatan pembiayaan pembangunan daerah ini digali dari sumber kemampuan keuangan sendiri dan diharapkan dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain, pemerintah daerah dimotivasi agar meningkatkan kemampuan, potensinya seoptimal mungkin dalam membelanjakan urusan rumah tangganya sendiri, dengan cara menggali segala sumber dana yang potensial yang ada didaerah tersebut. Selain itu Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN (Rawung, 2016) yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN, dana perimbangan juga sebagai kontribusi terbesar diatur didalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 agar pemerintahan dapat mengatur dan mengelola keuangan serta mencapai target kemandirian untuk mengelola otonom daerah. Pada umumnya kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara bersumber dari APBD, demikian halnya dengan pembangunan yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, dimana Pendapatan Asli Daerah (Reza, 2018) untuk jangka panjang

diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan daerah sehingga mampu membiayai sendiri pembangunan yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara agar dampaknya dapat mengurangi ketergantungan dari bantuan pemerintah pusat berupa dana perimbangan.

Tinjauan Literatur

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku bertujuan untuk memberikan kelulasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan kemampuan melaksanakan ekonomi sendiri. Pendapatan Asli Daerah ini sendiri perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan kemandirian otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab dengan menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan dari penerimaan daerah tersebut. Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang berisi tentang "Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang berasal dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi". Kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah sangat erat kaitannya dengan peningkatan kemandirian daerah. "Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah". Menurut (Mahmudi, 2010). Dari definisi diatas dapat disimpulkan pula bahwa Pendapatan Asli Daerah sangat penting peran dan pengaruhnya terhadap pembiayaan dan pendanaan daerah sendiri agar terciptanya tingkat pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan tingkat kemandirian yang baik.

Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah. Menurut (Darise, 2011). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan yang terdiri atas 3 (tiga) jenis sumber dana, merupakan pendanaan pelaksanaan Desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis Dana Perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi.

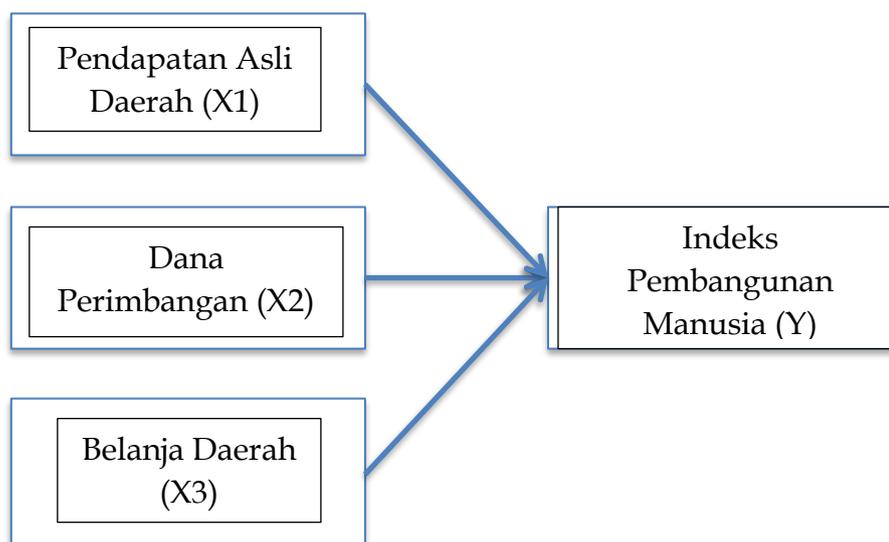
Belanja Daerah

Anggaran menyangkut rencana kegiatan baik yang bersifat rutin maupun kegiatan pembangunan. Untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, yang terdiri dari berbagai macam jenis kegiatan maka diperlukan rencana keuangan yang akan dijalankan pada masa mendatang (biasanya satu tahun). Rencana keuangan ini disebut anggaran negara (APBN). Anggaran pendapatan dan belanja itu disusun setiap tahun dan digunakan sebagai pedoman batas penggunaan sekaligus merupakan program kerja pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan disegala bidang. Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun

anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. (Darise, 2011). Berkembangnya fungsi-fungsi pemerintah di daerah membuktikan bahwa peranan Pemerintah Propinsi untuk mendorong pembangunan semakin nyata, maka untuk mendukung kegiatannya Pemerintah Propinsi perlu memupuk pembentukan modal, terutama dari pajak, retribusi dan pendapatan lainnya dengan merencanakan pembangunannya secara sistematis menurut kebutuhannya. Kebijakan daerah terhadap pendapatan dan pengeluaran daerah direncanakan dalam anggaran, menurut para ahli ekonomi bahwa anggaran dapat diartikan suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu yang biasanya adalah satu tahun. Anggaran menjadi suatu rencana pembelanjaan yang merupakan suatu dasar untuk pengambilan keputusan pengeluaran dan pengawasan selanjutnya atas pengeluaran-pengeluaran. Dari pendapat diatas dapat diambil suatu rumusan bahwa anggaran adalah rencana yang telah disusun secara sistematis dalam bentuk angka dari uang dan merupakan dasar untuk pengambilan keputusan penerimaan, pengeluaran dan pengawasan dalam waktu ke waktu.

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia adalah ukuran pencapaian suatu pembangunan manusia yang berbasis pada sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Perhitungan IPM sebagai indikator pembangunan manusia mempunyai tujuan yang sangat penting, yakni: membangun indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih. Teori Human capital berpendapat bahwa pendidikan adalah sumber investasi sumber daya manusia yang akhirnya memberikan banyak manfaat, seperti: mampu memperoleh lapangan kerja yang lebih baik, mampu bekerja efektif dan efisien, serta meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan individu tersebut ((Latifah, Rotinsulu and Tumilaar, 2017). IPM ialah dimensi buat melihat akibat kemampuan pembangunan area yang mempunyai format yang amat besar, sebab menampilkan mutu masyarakat sesuatu wilayah dalam perihal harapan hidup, intelektualitas serta standar hidup layak. Pada penerapan pemograman pembangunan, IPM pula berperan membagikan arahan dalam memastikan prioritas formulasi kebijaksanaan serta determinasi program pembangunan. Perihal ini ialah arahan dalam membagikan perhitungan yang cocok dengan kebijaksanaan biasa yang sudah ditetapkan oleh kreator kebijaksanaan serta pemilik ketetapan (Sayifullah and Gandasari, 2016).



METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih dengan penelitian ini maka akan dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala (Rusiadi & Hidayat, 2013). Jenis data penelitian menggunakan data sekunder laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh DJPK dan data statistik dari www.bps.go.id meliputi 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dimulai dari tahun 2019-2023. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode data panel dengan bantuan E-Views 12. Regresi Data Panel adalah salah satu metode analisis regresi yang digunakan untuk menghubungkan variabel dependen dan independen dalam satu model untuk unit pengamatan yang sama (dalam satu waktu) dan terus menerus dalam waktu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi variabel yang digunakan dalam penelitian.

	Y	X1	X2	X3
Mean	71.32024	248.1248	1060.981	1444.278
Median	71.39000	97.82000	946.8000	1170.180
Maximum	82.19000	3568.430	2580.600	7868.260
Minimum	61.14000	12.54000	454.7400	536.1200
Std. Dev.	4.510132	545.3098	485.9942	1100.312
Skewness	-0.210606	3.925437	1.338235	3.517395
Kurtosis	3.109229	18.78870	4.264327	16.65185
Jarque-Bera	1.301787	2137.570	60.23886	1621.546
Probability	0.521580	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	11767.84	40940.60	175061.8	238305.8
Sum Sq. Dev.	3335.971	48767503	38735214	1.99E+08
Observations	165	165	165	165

Sumber : Hasil Pengolaan E-views 12

Y = Indeks Pembangunan Manusia

X1 = PAD

X2 = Dana Perimbangan

X3 = Belanja Daerah

Tabel di atas menunjukkan jumlah data (N) yang digunakan dalam penelitian sebanyak 33 sampel, nilai terendah, tertinggi, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi dari masing-masing variabel yang diteliti. Berdasarkan pengujian statistik deskriptif variable pendapatan asli daerah memiliki nilai minimum sebesar 12,54 nilai maksimum sebesar 3568,43 sedangkan, nilai mean (rata-rata) sebesar 248,12 dengan standar deviasi sebesar 545,30. Pengujian statistik deskriptif variabel dana perimbangan memiliki nilai minimum sebesar 454,74 dan nilai maksimum sebesar 2580,60 sedangkan nilai mean (rata-rata) sebesar 1060,98 dengan standar deviasi 485,99. Pengujian statistik deskriptif variabel belanja daerah memiliki minimum sebesar 536,12 dan nilai maksimum sebesar 7868,26, sedangkan nilai mean (rata-rata) sebesar 1444,27 dengan standar deviasi 1100,31. Pengujian statistik deskriptif variabel indeks pembangunan manusia memiliki nilai minimum sebesar 61,14 dan nilai maksimum sebesar 82,19 sedangkan nilai mean (rata-rata) sebesar 71,32 dengan standar deviasi 4,51.

Pemilihan Regresi Data Panel

Ada tiga pengujian yang dilakukan untuk menentukan model estimasi data panel yang kemudian akan digunakan mengelolah data panel yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier.

Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
 Equation: Untitled
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	149.821295	(32,129)	0.0000
Cross-section Chi-square	600.916494	32	0.0000

Sumber: Hasil Pengelolaan menggunakan E-views 12.0

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai Statistic Cross Section Chi-Square sebesar 600.916494 dengan nilai Prob. 0.0000. Hal tersebut berarti kurang dari 0,05 ($0.0000 < 0,05$) maka secara statistik H1 diterima dan menolak Ho. Sehingga dalam Uji Chow ini, model yang terpilih adalah **Fixxed Effect Model (FEM)**.

Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
 Equation: Untitled
 Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.872696	3	0.0310

Sumber: Hasil Pengelolaan menggunakan E-views 12.0

Nilai distribusi statistik Chi Square berdasarkan tabel diatas sebesar 8.872696 dengan nilai Prob. 0.0310. Hal tersebut berarti kurang dari 0,05 ($0.0310 < 0,05$) maka secara statistik H1 diterima dan menolak Ho. Sehingga dalam Uji Chow ini, model yang terpilih adalah **Fixxed**

Effect Model (FEM)

Dapat disimpulkan bahwa pemilihan model terbaik dalam regresi data panel pada penelitian ini adalah Fixxed Effect Model sehingga dalam asumsi klasik dilakukan Uji Multikolinearitas dan Heteroskedasitas.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

X1	1	0.68238523...	0.90134144...
X2	0.68238523...	1	0.84353726...
X3	0.90134144...	0.84353726...	1

Sumber: Hasil Pengelolaan menggunakan E-views 12.0

Berdasarkan tabel diatas Dapat diketahui jika nilai kolerasi antara PAD dan Belanja daerah sebesar 0,06238523. Nilai kolerasi PAD dan Dana Perimbangan sebesar 0.90134144 (> 0.80) maka terjadi kesalahan dalam uji multikolinearitas. Nilai kolerasi Belanja Daerah dan Dana Perimbangan sebesar 0.84353726 (> 0.80) maka terjadi kesalaham dalam uji multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.998330	2.695961	-1.483082	0.1405
Y	0.038596	0.039963	0.965795	0.3360
X3	-0.000383	0.000188	-2.038337	0.0436
X2	0.002195	0.000472	4.649658	0.0000
X1	4.26E-06	0.000149	0.028678	0.9772

Sumber: Hasil Pengolahan menggunakan E-views 12.0

Berdasarkan tabel diatas hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejer, maka kita ketahui bahwa terdapat masalah Heteroskedastisita, dikarenakan output mempunyai nilai probabilitas Chi-Square yang signifikan (nilai $p=0.0000$) maka terjadi heteroskedastisitas.

Uji Signifikansi

Berdasarkan Uji Chow dan Uji Hausman model yang terpilih adalah Fixxed Effect Model (FEM)

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 05/21/24 Time: 21:55
Sample: 2019 2023
Periods included: 5
Cross-sections included: 33
Total panel (balanced) observations: 165

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	66.58263	0.955880	69.65583	0.0000
X1	-0.000115	0.000327	-0.350135	0.7268
X2	0.004931	0.000945	5.215643	0.0000
X3	-0.000322	0.000413	-0.780370	0.4366

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.979590	Mean dependent var	71.32024
Adjusted R-squared	0.974053	S.D. dependent var	4.510132
S.E. of regression	0.726496	Akaike info criterion	2.389063
Sum squared resid	68.08575	Schwarz criterion	3.066724
Log likelihood	-161.0977	Hannan-Quinn criter.	2.664149
F-statistic	176.9018	Durbin-Watson stat	0.855518
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Pengolahan menggunakan E-views 12.0

Dari tabel tersebut dapat disusu persamaan data panel sebagai berikut: **$IPM = 66.58263 - 0.000115 PAD + 0.004931 Dana Perimbangan - 0.000322 Belanja Daerah$**
Berdasarkan persamaan tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta bernilai positif **66.58263**, hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel PAD, Belanja Daerah dan Dana Perimbangan konstan, maka Indeks Pembangunan Manusia sebesar **66.58263**
2. Kofisien Regresi varibel Pendapata Asli Daerah bernilai negatif sebesar **- 0.000115** hal ini menunjukkan PAD meningkat maka IPM menurun sebesar **- 0.000115** dengan anggapan variabel lainnya konstan.
3. Kofisien Regresi varibel Dana Perimbangan bernilai positif sebesar **0.004931** hal ini menunjukkan Belanja Daerah meningkat maka IPM meningkat sebesar **0.004931**, dengan anggapan variabel lainnya konstan
4. Kofisien Regresi varibel Belanja Daerah bernilai negatif sebesar **- 0.000322** hal ini menunjukkan Belanja Daerah meningkat maka IPM menurun sebesar **- 0.000322**, dengan anggapan variabel lainnya konstan.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.979590	Mean dependent var	71.32024
Adjusted R-squared	0.974053	S.D. dependent var	4.510132
S.E. of regression	0.726496	Akaike info criterion	2.389063
Sum squared resid	68.08575	Schwarz criterion	3.066724
Log likelihood	-161.0977	Hannan-Quinn criter.	2.664149
F-statistic	176.9018	Durbin-Watson stat	0.855518
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan tabel model FEM diketahui nilai prob (F-Statistik) sebesar 0.00000. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilainya lebih kecil dari tingkat signifikansi (< 0.05). Sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Jadi PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Uji Statistik Parsial (Uji T)

Nilai t tabel sebesar 2,04523 diperoleh dari $k = 4$ (Jumlah Variabel), $n = 33$ (Jumlah Kota/kab Sumut). $df = n-k = 29$. Jika dilihat dari titik presentase distribusi t maka tingkat signifikansi 5 % sebesar 2,04523. Jika t hitung $<$ ttabel maka H_0 diterima, artinya X tidak berpengaruh terhadap Y.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	66.58263	0.955880	69.65583	0.0000
X1	-0.000115	0.000327	-0.350135	0.7268
X2	0.004931	0.000945	5.215643	0.0000
X3	-0.000322	0.000413	-0.780370	0.4366

Berikut adalah uji parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen:

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan output pada tabel diatas diketahui nilai thitung pada variabel PAD sebesar 0.7268 yang berarti lebih kecil dari ttabel ($-0.350135 < 2,04523$) maka nilai probability 0.7268 yang berarti lebih besar dari tingkat signifikansi ($0.7268 > 0.05$). maka dapat disimpulkan bahwa variabel PAD tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM.
2. Variabel Belanja Daerah. Berdasarkan output pada tabel diatas diketahui nilai thitung pada variabel Belanja Daerah sebesar 0.0000 yang berarti lebih besar dari ttabel ($5.215643 < 2,04523$) maka nilai probability 0.0000 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi ($0.0000 < 0.05$). maka dapat disimpulkan bahwa variabel Belanja Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM.
3. Variabel Dana Perimbangan. Berdasarkan output pada tabel diatas diketahui nilai thitung pada variabel Belanja Daerah sebesar 0.4366 yang berarti lebih kecil dari ttabel ($-0.780371 < 2,04523$) maka nilai probability 0.4366 yang berarti lebih besar dari tingkat signifikansi ($0.4366 < 0.05$). maka dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Perimbangan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM.

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.979590	Mean dependent var	71.32024
Adjusted R-squared	0.974053	S.D. dependent var	4.510132
S.E. of regression	0.726496	Akaike info criterion	2.389063
Sum squared resid	68.08575	Schwarz criterion	3.066724
Log likelihood	-161.0977	Hannan-Quinn criter.	2.664149
F-statistic	176.9018	Durbin-Watson stat	0.855518
Prob(F-statistic)	0.000000		

Uji Koefisien Determinasi

Diketahui pada tabel diatas nilai Adjusted R-Square sebesar 0,974053 artinya kemampuan variabel indenpendan dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 97,40% sedangkan sisanya 2,60% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak terdapat dalam model ini. Artinya variabel PAD, Belnaja Daerah dan Dana Perimbangan Sebesara 97,40% dapat memprediksi Indeks Pembangunan Manusia.

Pembahasan

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian nilai signifikan $0,7268 > 0,05$ yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Sumatera Utara. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang berhak diakui pemerintah daerah dimana pemerintah daerah memiliki wewenang mengelola sumber pendapatan yang berasal dari daerahnya. Hubungan antara dana perimbangan dengan kinerja keuangan pemerintah Provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa semakin tingginya dana perimbangan dan pendapatan asli daerah yang diterima dari pemerintah akan menunjukkan tingginya ketergantungan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi di setiap daerahnya.
2. Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian nilai signifikan $0,000 < 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Sumatera Utara. Dengan adanya dana perimbangan diharapkan pemerintah di setiap Provinsi di Indonesia dapat menggunakan sumber pendanaan tersebut untuk kegiatan dan proyek pemerintah yang konstruktif dan produktif sehingga dari kegiatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan income yang lebih besar. Dana perimbangan untuk kegiatan pembangunan daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga menyebabkan kinerja keuangan pemerintah di setiap Provinsi di Indonesia meningkat juga.
3. Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian nilai signifikan $0,4366 > 0,05$ yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Sumatera Utara. Adanya kewenangan yang diberikan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam penyusunan anggaran yang diatur dalam UU No. 32/2004, memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah agar mengelola pembangunan daerahnya sesuai dengan proporsional daerah masing-masing. Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik.

KESIMPULAN

Setelah melakukan uji data maka Kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, (1). Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Sumatera Utara. (2). Dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Sumatera Utara. (3). Belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Sumatera Utara. (4). Pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

Arispen, A., & Rahmi, D. (2021). Pengaruh Dana Otonomi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh Tahun 2008-2020. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 75-81.

- Rangkuty, D. M., Yusuf, M., & Pasaribu, R. A. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan*, 11(1), 41-52.
- Sembiring, E. A. (2011). *Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Williantara, G. F., & Budiasih, I. G. A. N. (2016). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil pada indeks pembangunan manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(3), 2044-2070.